

# RENSTRA

RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH



**BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN 2021 - 2026**

JL. BASUKI RAHMAD NO. 2  
LAMONGAN KODE POS 62251  
TELP. (032) 321010

Lamongan  
Megilan



## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur Alhamdulillah, atas berkah dan Rahmat Allah SWT, BPKAD Kabupaten Lamongan telah menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 – 2026. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 ini kami susun sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20) dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan.

Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 kami susun dengan menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021-2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026

serta dijadikan pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2022-2026).

Dengan demikian penyusunan Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026 merupakan hasil analisa yang telah dilaksanakan oleh BPKAD dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan serta potensi dan permasalahan yang berasal dari internal BPKAD maupun yang berasal dari lingkungan eksternal. Dengan penyusunan *mapping* yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang akan dirumuskan selanjutnya menjadi lebih responsive, efektif dan efisien.

Lamongan, 15 September 2021  
Plt. Kepala Badan Pengelolaan  
Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Lamongan



Dis. HERY PRANOTO  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620805 198903 1 010

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>I</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>III</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD</b>	<b>12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;	12
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD</b>	<b>33</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	41
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	42
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>44</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	44
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>50</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>54</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>85</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>82</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atau BPKAD Tahun 2021 – 2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan BPKAD, dokumen ini juga menunjukkan peran BPKAD dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada periode pemerintahan tahun 2021-2024.

Secara umum, Renstra BPKAD Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Selain itu, penyusunan Renstra BPKAD juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perkembangan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah, dan perekonomian Lamongan sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BPKAD diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian BPKAD dalam rangka penyusunan Renstra Tahun 2021 – 2026 adalah merebaknya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia khususnya di Lamongan. Mengingat dampak wabah Covid-19 diperkirakan akan berdampak pada perekonomian global hingga beberapa tahun ke depan, Renstra BPKAD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah telah mencantumkan berbagai respons yang diperlukan sebagai tindak lanjut dari diberlakukannya beberapa kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sehingga Pemerintah Daerah / kota di Indonesia, dalam pengelolaan keuangannya harus menganut system

penganggaran dinamis sebagaimana yang terjadi di tahun APBD tahun 2020 dan 2021.

Penganggaran dinamis yang diimplementasikan oleh Pemerintah Pusat akibat dari fluktuasi perekonomian nasional dan global, berakibat pada kemampuan fiskal yang cenderung mengalami penurunan. Hal ini telah mempengaruhi pencapaian kinerja yang akan dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tahun 2021 – 2026 menjadikan pengelolaan keuangan daerah harus lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan – perubahan yang sering terjadi.

Untuk itu dibutuhkan respons berupa strategi-strategi yang dirumuskan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 pada aspek pengelolaan keuangan serta Langkah-langkah yang mengarah pada kebijakan pengelolaan keuangan untuk mendukung recovery perekonomian daerah pada periode 2021 – 2026.

Sebagai pengelola keuangan daerah, maka aspek keuangan daerah mempunyai arti yang cukup penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang terkadang menjadi bahan permasalahan yang dihadapi di daerah dan berkaitan dengan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan adalah keseluruhan kegiatan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan mempunyai tugas membantu Bupati Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

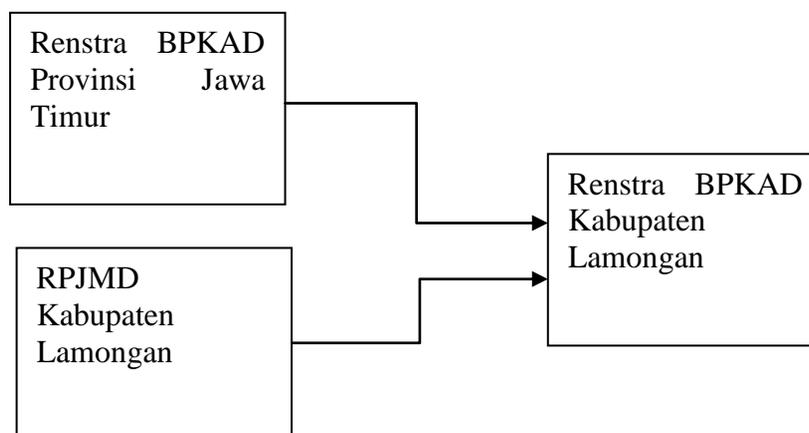
- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah ;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20) dan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026; maka diperlukan adanya Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

Selaras dengan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi tujuan dan sasaran dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan untuk kurun waktu 2021 – 2026 maka perlu disusun dokumen perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA. Dengan demikian RPJMD Kabupaten Lamongan menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen

perencanaan Organisasi Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.

**Gambar 1.1**  
**Hubungan antara Renstra BPKAD Provinsi – RPJMD**  
**Lamongan – Renstra BPKAD Lamongan**



Penyusunan Renstra Perangkat Daerah tidak dapat terlepas dari RPJMD, Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra BPKAD Lamongan dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra BPKAD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah seperti perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas serta pengelolaan badan milik daerah yang optimal. Selain itu dalam penyusunan Renstra PD juga tetap memperhatikan Renstra Provinsi untuk menyelaraskan program Pengelolaan Keuangan serta perlunya memperhatikan adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Pelaksanaan Renstra setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana kerja Tahunan, sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan PD yang memuat program dan kegiatan Tahunan yang ada di Renstra PD.

Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran visi, misi dan program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan secara lebih teknis dalam Rencana Kerja (Renja).

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum pembuatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021 – 2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan

Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
24. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No 39);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 - 2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3).
32. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - Tahun 2026 adalah untuk penyelarasan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun lima tahun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan indikasi kegiatan BPKAD Kabupaten Lamongan beserta indikator kinerja dan target kinerja pada tahun 2021- 2026 dalam menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026;
- 2) Memberikan pedoman bagi BPKAD Kabupaten Lamongan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan (Tahun 2022- 2026);
- 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja BPKAD Kabupaten Lamongan khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan oleh Kepala BPKAD kabupaten Lamongan.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kabupaten Lamongan 2021- 2026 disusun sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang;

1.2 Landasan Hukum;

- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah;

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BABVII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LAMONGAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

##### **2.1.1 Kedudukan dan Tugas**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

##### **2.1.2 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, BPKAD Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Progran Kerja, Pedoman Pelayanan Umum, Kebijakan teknis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Badan;
- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Badan yang meliputi kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;
- d. Perumusan rencana pembangunan di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;

- e. Penyelenggaraan program kesekretariatan, anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan serta UPT dan Jabatan Fungsional;
- f. Penyampaian laporan, saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang anggaran, perbendaharaan, aset, akuntansi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

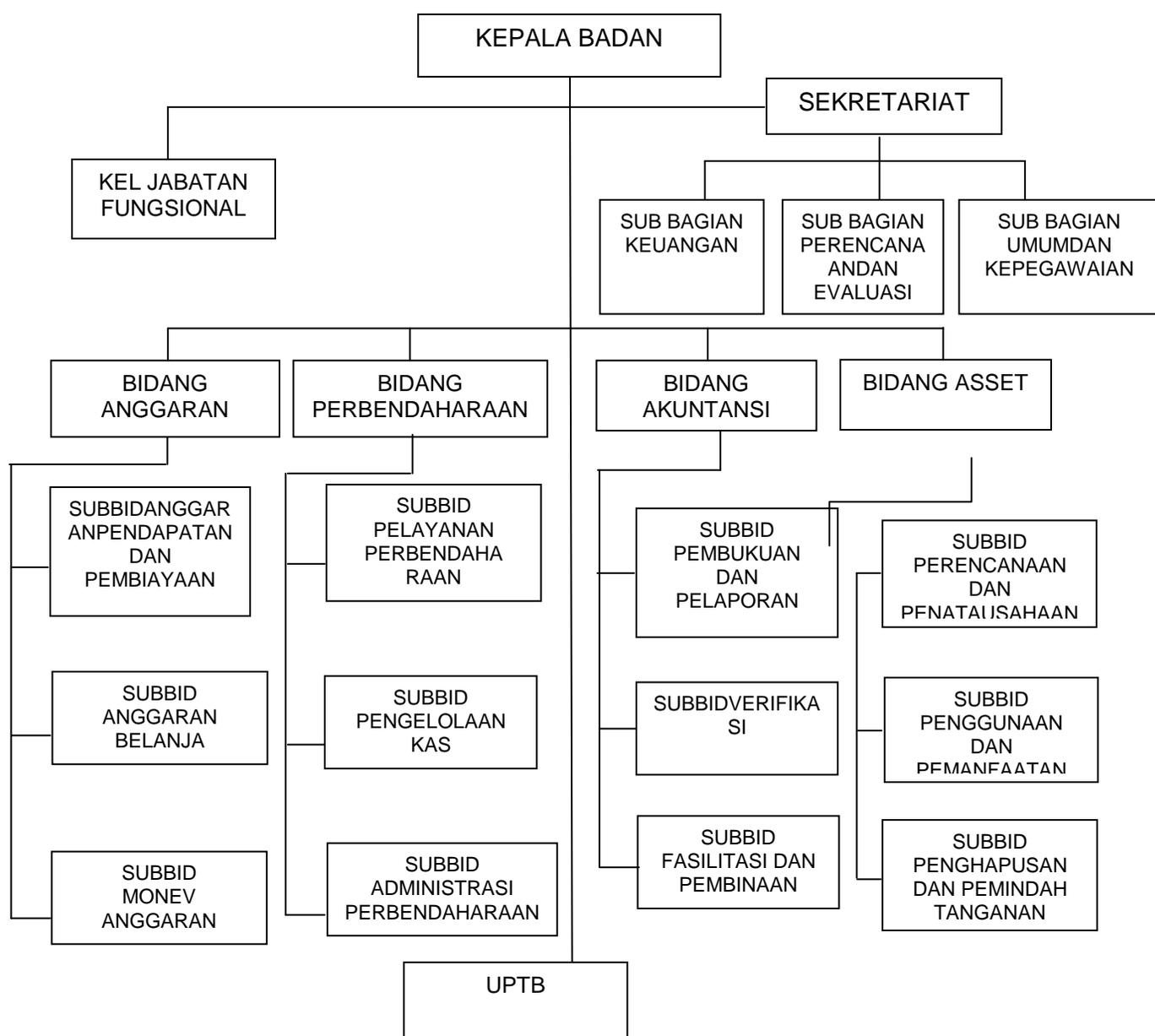
Selanjutnya berdasarkan landasan hukum yang sama, Susunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
  - 1. Kepala Sub Bagian Keuangan
  - 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
  - 3. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian
- c. Kepala Bidang Anggaran, membawahi :
  - 1. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
  - 2. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja
  - 3. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran
- d. Kepala Bidang Perbendaharaan, membawahi:
  - 1. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Perbendaharaan
  - 2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas
  - 3. Kepala Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan
- e. Kepala Bidang Akuntansi, membawahi
  - 1. Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
  - 2. Kepala Sub Bidang Verifikasi
  - 3. Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan
- f. Kepala Bidang Aset, membawahi :
  - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan

- 2. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
- 3. Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan digambarkan sebagaimana gambar 2-1

**GAMBAR 2.1**  
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN**



**Sumber** :Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

## **2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LAMONGAN**

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagiterbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Goodgovernance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakanhukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif.

Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraanpemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salahsatu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima)tahun kedepan. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakanpublik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat iniadalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkankebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Pemerintahan yangcerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki jumlah aparatur sebanyak 70 yang terdiri dari 37 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 33 orang tenaga kontrak, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2. 1**  
**Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan**  
**Status Kepegawaian**

<b>No</b>	<b>Status Kepegawaian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pegawai Negeri Sipil	37
2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak	0
3	Tenaga Kontrak Kerja	33
	Total	70

Adapun komposisi dan kebutuhan sumber daya manusia yang tersedia di tahun 2021 sampai dengan 2026 sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Komposisi dan kebutuhan sumber daya manusia**  
**Tahun 2021 - 2026**

No	Nama Jabatan	Jumlah kondisi SDM saat ini			Jumlah kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2026	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0			1		1	
2	Sekretaris	1			1		1	
3	Kepala Bidang Anggaran	1			1		1	
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	1			1		1	
5	Kepala Bidang Akuntansi	1			1		1	
6	Kepala Bidang Aset	1			1		1	
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1			1		1	
7.1	Verifikator Data Laporan Keuangan	1			1		1	
7.2	Bendahara	1			1		1	
8	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi	1			1		1	
8.1	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan							
9	Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian	1			1		1	
9.1	Pengadministrasi Umum							
9.2	Pengadministrasi Kepegawaian							
9.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							
10	Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan	1			1		1	
10.1	Analisis Perencanaan Anggaran							
10.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
11	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja	1			1		1	
11.1	Analisis Perencanaan Anggaran							
11.2	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							

No	Nama Jabatan	Jumlah kondisi SDM saat ini			Jumlah kebutuhan SDM s.d. Tahun 2026		Jumlah Pemenuhan SDM s.d. Tahun 2026	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
12	Kepala Sub Bidang Monev Anggaran	1			1		1	
12.1	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran							
12.2	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran							
12.3	Analisis Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran							
13	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Perbendaharaan	1			1		1	
13.1	Penata Keuangan							
13.1	Bendahara	1			1		1	
14	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas	1			1		1	
14.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
14.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan							
14.3	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
15	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan	1			1		1	
15.1	Penyusun Laporan Keuangan							
15.2	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan							
16	Kepala Sub Bidang Verifikasi	1			1		1	
16.1	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara							
17	Kepala Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan	1			1		1	
17.1	Analisis Bimbingan Teknis Anggaran							
18	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan	0			1		1	
18.1	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris							
18.2	Kustodian Kekayaan Negara							
19	Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan	1			1		1	
19.1	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah							
20	Kepala Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan	0			1		1	
20.1	Kustodian Kekayaan Negara							
20.2	Pengelola Pemegang Ijin Penyewa Tanah dan Inventarisasi Aset Daerah							

Keadaan pegawai menurut golongan jumlah pegawai BPKAD Golongan III (29) yang paling banyak, sedangkan untuk golongan paling sedikit adalah Golongan II (4) :

**Tabel 2.3**  
**Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan Golongan**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2.	Pembina (IV/a)	3
3.	Penata Tingkat I (III/d)	11
4.	Penata (III/c)	11
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2
6.	Penata Muda (III/a)	5
7.	Pengatur (II/c)	4

Keadaan pegawai menurut kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Klasifikasi SDM BPKAD Kabupaten Lamongan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No	Pendidikan	Laki - Laki	Wanita	Jumlah
1	S-2	11	9	20
2	S-1	3	9	12
3	D.III	1	1	2
4	SLTA	3	-	2

b. Aset, Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan adalah tersedianya aset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana BPKAD Kabupaten Lamongan telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian-penyesuaian. Aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki BPKAD Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	2.	3.
1.	Roda 4 (empat)	24
2.	Roda 2 (dua)	50
3.	Komputer	111
4.	Printer	76
5.	Lap Top	29
6.	Mesin Ketik	7
7.	Mesin Foto Copy	2
8.	Mesin Ketik Elektrik	1
9.	Meja Rapat	30
10.	Meja Tulis/Staf	84
11.	Meja Kursi Tamu	6
12.	Meja Telepon	4
13.	Meja Komputer	5
14.	Meja Eselon II	1
15.	Meja Eselon III	5
16.	Meja Eselon IV	18
17.	Kursi Eselon II	2
18.	Kursi Eselon III	5
19.	Kursi Eselon IV	20
20.	Lemari Besi	33
21.	Lemari Kayu	13
22.	Rak Besi	25
23.	Rak Kayu	21
24.	Filling Kabinet	12
25.	Kipas Angin	4
26.	AC	31
27.	Brankas	4
28.	LCD Proyektor + Attachment	5
29.	Handy Cam	1
30.	Tabung PMK	3
31.	Papan Visual/SO	1
32.	Papan Pengumuman	16
33.	White Board	2
34.	White Board Elektronic	1
35.	Werelles	4
36.	Komputer Mainframe/Server	5
37.	UPS Stabilizer	1
38.	Pesawat Telepon	8
39.	Faximile	3
40.	Tangga Lipat	1
41.	Televisi	13
42.	Gambar Garuda	3

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
43.	Korden	1
44.	Sound System	4
45.	Kursi Lipat	197
46.	Lemari Buku untuk Arsip Dinamis	40
47.	Camera + Attachment	6
48.	Kaca Hias	3
49.	Gucci	5
50.	Almari Es	7
51.	Jam Dinding	6
52.	Kursi Kayu	7
53.	Almari BPKB	2
54.	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	96
55.	Dispenser	4
56.	Penghancur Kertas	3
57.	Scanner	2
58.	Mesin Potong Rumput	4
59.	Trolly	1
60.	Pompa Air	3
61.	Organ/Keyboard	2
62.	Meja Kecil/Rak TV	5
63.	Kursi Rapat/Putar	74
64.	Sofa	7
65.	Ventilator Udara	26
66.	Microphone Wirelles	1
67.	Microphone	3
68.	Stand Microphone	5
69.	Kursi Pelayanan gandeng 4	6
70.	Monitor/Dispal 20" Touch Screen	1
71.	Hardisk 3 Terabyte 7200 rpm	4
72.	Mesin Penyedot Debu	1
73.	Hardisk Server	1
74.	RAM Memory	2

### **2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan

bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengikuti peraturan perundang - undangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan PD diukur berdasarkan sasaran/target Renstra PD periode sebelumnya, dimana Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu:

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- d. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah;

Hal ini disebabkan karena dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan tersebut diatas. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut tidak terlepas dari dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja Pelayanan Badan Perangkat daerah Kabupaten Lamongan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD) Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.6  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>TUJUAN :</b> <b>Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan</b>																			
	Opini pemeriksa eksternal				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
<b>SASARAN :</b> <b>Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan Aset Secara Tertib, Akuntabel dan Transparan</b>																			
	Prosentase Kesesuaian Kegiatan Dengan Perencanaan				95%	96%	97%	98%	99%	98%	100%	100%	100%	-	103%	104%	103%	102%	-
	Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target				10%	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%	5,11%	6,40%	7,04%	6,23%	-	196%	154%	140%	157%	-
	Prosentase Pertanggungjawaban APBD Tepat Waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	Prosentase Data Aset Yang Akurat				75%	80%	85%	90%	95%	70%	96%	97%	97%	-	94%	120%	114%	108%	-
<b>Program :</b>																			

<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> Indikator : Prosentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik				100%	100%	100%	100%		87,32 %	86,65 %	90,18 %	83,48 %		87,32 %	86,65 %	90,18 %	83,48 %	
<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b> Indikator : Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik				100%	100%	100%	100%		96,50 %	95,59 %	95,47 %	84,71 %		96,50 %	95,59 %	95,47 %	84,71 %	
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> Indikator : Prosentase aparatur yang disiplin				100%	100%	100%	100%		99,78 %	97,88 %	97,81 %	98,88 %		99,78 %	97,88 %	97,81 %	98,88 %	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> Indikator : Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				100%	100%	100%	100%		99,77 %	92,83 %	83,49 %	87,76 %		99,77 %	92,83 %	83,49 %	87,76 %	
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan</b>				100%	100%	100%	100%		72,96 %	98,93 %	91,75 %	97,61 %		72,96 %	98,93 %	91,75 %	97,61 %	

	<b>Keuangan</b> Indikator : Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu																	
	<b>Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah</b> Indikator : Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan Keuangan Yang Disusun			100%	100%	100%	100%		98,39 %	99,11 %	99,60 %	94,38 %		98,39 %	99,11 %	99,60 %	94,38 %	
	<b>Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah</b> Indikator : Prosentase Jumlah Laporan Keuangan BUD Yang Disusun			100%	100%	100%	100%		99,19 %	98,77 %	99,43 %	99,78 %		99,19 %	98,77 %	99,43 %	99,78 %	
	<b>Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah</b> Indikator : Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Daerah Yang Disusun			100%	100%	100%	100%		99,60 %	99,67 %	96,08 %	96,08 %		99,60 %	99,67 %	96,08 %	96,08 %	
	<b>Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi</b>			100%	100%	100%	100%		93,96 %	89,75 %	96,50 %	94,59 %		93,96 %	89,75 %	96,50 %	94,59 %	

	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b> Indikator : Prosentase Jumlah Dokumen Laporan Barang Daerah Yang Disusun																													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Secara keseluruhan hampir semua pencapaian kinerja pelayanan BPKAD terealisasi sesuai target. Namun terdapat penurunan satu sasaran yakni Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan yang mengalami penurunan target pada realisasi 2019 yakni 7,04% dari realisasi tahun lalu 6,40%. Hal ini terjadi di karenakan perencanaan pengelolaan keuangan yang belum maksimal dan masih banyaknya anggaran yang tidak terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Penilaian positif terhadap pencapaian pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan tidak hanya ditunjukkan melalui capaian kinerja pelayanan, akan tetapi juga ditunjukkan dengan capaian kinerja keuangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penetapan pagu indikatif dalam penyusunan Renstra BPKAD tahun 2021 – 2026. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan BPKAD tahun 2017 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.7

## Anggaran Dan Realisasi Pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	702.281.612.195,32	703.037.282.337,00	9.529.420.000,00	13.533.150.765,00	-	679.547.475.064,10	685.429.697.121,00	8.941.230.425,00	12.286.154.002,00	-	96,76%	97,50%	93,83%	90,79%	-
Belanja Langsung	17.372.471.100,00	14.072.699.000,00	19.111.595.000,00	22.919.950.600,00	-	16.602.092.584,00	13.246.109.280,00	18.230.164.432,00	20.741.145.103,00	-	95,57%	94,13%	95,39%	90,49%	-
Total Belanja	719.654.083.295,32	717.109.981.337,00	28.641.015.000,00	36.453.101.365,00	-	696.149.567.648,10	698.675.806.401,00	27.171.394.857,00	33.027.299.105,00	-	96,73%	97,43%	94,87%	90,60%	-

**TABEL 2.8****Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD Lamongan**

Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.965.158.600	3.176.520.000	3.410.815.000	3.651.407.800	-	1.715.881.163	2.752.351.315	3.075.995.332	3.048.197.453	-	87,32%	86,65%	90,18%	83,48%	
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	7.833.500.000	1.843.150.000	4.680.930.000	6.729.727.700	-	7.559.476.445	1.761.854.650	4.469.042.700	5.700.908.150	-	96,50%	95,59%	95,47%	84,71%	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	93.000.000	163.375.000	146.500.000	195.445.800	-	92.800.000	159.912.200	143.296.300	193.258.200	-	99,78%	97,88%	97,81%	98,88%	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	160.000.000	615.625.000	795.550.000	598.386.500	-	159.625.000	571.455.000	664.238.000	525.166.200	-	99,77%	92,83%	83,49%	87,76%	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	340.000.000	333.000.000	424.000.000	461.000.000	-	248.054.350	329.428.700	389.039.000	449.978.000	-	72,96%	98,93%	91,75%	97,61%	
Program Pengelolaan Perencanaan Keuangan Daerah	2.590.812.500	3.063.529.000	3.805.200.000	4.701.924.800	-	2.549.005.847	3.036.312.000	3.789.830.150	4.437.504.900	-	98,39%	99,11%	99,60%	94,38%	
Program Pengelolaan Penatausahaan dan Administrasi Keuangan Daerah	1.530.000.000	1.300.000.000	2.155.000.000	2.406.592.000	-	1.517.587.935	1.283.965.000	2.142.822.000	2.401.278.200	-	99,19%	98,77%	99,43%	99,78%	
Program Pengelolaan Pelaporan Keuangan Daerah	1.285.000.000	1.410.500.000	1.998.600.000	2.365.000.000	-	1.279.829.244	1.405.900.000	1.920.233.100	2.272.335.600	-	99,60%	99,67%	96,08%	96,08%	
Program Tertib Administrasi dan Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.575.000.000	2.167.000.000	1.695.000.000	1.810.466.000	-	1.479.832.600	1.944.930.415	1.635.667.850	1.712.518.400	-	93,96%	89,75%	96,50%	94,59%	

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan:

Perumusan kebijakan teknis di bidang, pengelolaan keuangan dan aset daerah Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta Pembinaan teknis, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan diantaranya:

- a. Penyediaan Dokumen Perencanaan Anggaran (KUA PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan;
- b. Penyediaan Dokumen aset daerah;
- c. Pelayanan dan bimbingan terkait Keuangan dan aset daerah;
- d. Pengembangan teknologi untuk memaksimalkan Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan;
- e. Penyediaan informasi terkait keuangan dan aset daerah;
- f. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **2.4.1 Tantangan**

Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tupoksi dan memberikan pelayanan terkait perencanaan terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

- a. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- b. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT;
- c. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang keuangan dan aset daerah;
- d. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya

dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD

- e. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
- f. Perubahan Regulasi dari Pemerintah Pusat/Provinsi;
- g. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya;
- h. Sistem informasi yang tersedia, pada bagian tertentu belum terintegrasi khususnya aplikasi sistem informasi pemerintah daerah yang belum terhubung dengan pihak perbankan, sehingga tidak bisa melayani secara integrasi pelayanan bidang perbendaharaan.

#### **2.4.2 Peluang**

Sedangkan beberapa faktor pendukung yang dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah dijelaskan bahwa BPKAD mempunyai tugas antara lain menyusun rancangan perda tentang APBD dan perubahan APBD , dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. Sehingga dalam hal ini BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- b. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dijelaskan bahwa salah satu tupoksi BPKAD Kab. Lamongan adalah melakukan pembinaan dan pendampingan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sehingga dalam hal ini BPKAD Kab. Lamongan diharapkan lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh perangkat

daerah di lingkungan Kabupaten Lamongan terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- c. Tersedianya sistem informasi yang memadai yang terus dikembangkan baik untuk implementasi di proses penganggaran, pelayanan perbendaharaan, pelaporan dan pengelolaan aset memudahkan pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara cepat, dan akurat.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, maka peranan BPKAD sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasaranan serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu-isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan, antara lain :

Tabel 3. 1 Pemataan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Faktor - Faktor yang Mempengaruhi	
				Internal	Eksternal
1	Kurangnya Optimalisasi dan efisiensi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan	Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan yang mendukung kemudahan pelayanan	Masih kurangnya inovasi dalam pengembangan teknologi terkait pengelolaan keuangan	Terdapat sistem teknologi dari pusat namun masih dalam tahap pengembangan (Aplikasi SIPD)
			Kemampuan dibidang kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi dan IT	Kurangnya jumlah personil yang memiliki kemampuan teknis sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja	Belum semua SDM mendapatkan bimbingan teknis mengenai pengelolaan keuangan daerah
		Masih lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah	Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan yang menyebabkan kesalahan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan	Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dalam memegang peranan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan	Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota yang terus berubah berpengaruh terhadap perumusan kebijakan
	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku	Masih Lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar legalitas kepemilikan Aset Pemerintah Kabupaten Lamongan	Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelola aset daerah	Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota mengenai pengelolaan aset daerah	

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Lamongan**

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lamongan sehingga semua Langkah - langkah yang disusun dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021- 2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

Pernyataan Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut :

Visi Kabupaten Lamongan:

**“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”**

Misi Kabupaten Lamongan :

Sesuai dengan visi “Terwujudnya kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi unggulan daerah
- Misi 2 : Mencetak SDM unggul, berdaya saing dan berakhlak yang responsif terhadap perubahan zaman

- Misi 3 : Membangun infrastruktur handal dan berkeadilan yang berwawasan lingkungan
- Misi 4 : Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sejahtera religius-berbudaya, aktif dalam pembangunan, serta lingkungan yang aman dan tentram
- Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi

Pada misi kelima ini, BPKAD Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sesuai Peraturan Bupati Peraturan Bupati Lamongan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. BPKAD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan strategis dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Lamongan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih dapat diuraikan sebagai berikut:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD sehingga dalam pengelolaan keuangan dan

Penyusunan Laporan keuangan Daerah yang tepat anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diharapkan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah bisa dipertahankan WTP (wajar tanpa pengecualian).

Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang telah diuraikan di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki keterkaitan langsung dalam menunjang pelaksanaan pembangunan dalam bentuk program program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

**TABEL III.2TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM BUPATI/WAKIL BUPATI LAMONGAN**

No.	Visi/Misi/Program Kerja Bupati/Wakil Bupati	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Faktor yang Mempengaruhi	
				Pendukung	Penghambat
1	<p>VISI :</p> <p>"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan"</p> <p>Misi Ke-5 :</p> <p>"Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi"</p> <p>Tujuan :</p> <p>"Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa"</p> <p>Sasaran :</p> <p>"Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal"</p> <p>Indikator : Opini BPK</p>	<p>Melaksanakan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah</p>	<p>Perlunya Peningkatan Kualitas Optimalisasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya peraturan perundang-undangan terkait sistem keuangan yang dapat dipedomani</li> <li>Komitmen dan etos kerja ASN BPKAD yang tinggi</li> <li>Sarana dan Prasarana yang memadai</li> <li>Secara bertahap akan dilakukan bimtek dan pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan</li> <li>Kuantitas dan kualitas SDM BPKAD masih kurang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja</li> </ol>

	<p>Program Prioritas :</p> <p>1. “Program Pengelolaan Keuangan Daerah”  Indikator : . Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD</p> <p>2. “Program Pengelolaan Barang Milik Daerah “  Indikator : Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.</p>				
--	---	--	--	--	--

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dilakukan dengan menyandingkan dengan sasaran Renstra Kementerian Keuangan dan BPKAD Provinsi Jawa Timur. Penelaahan Renstra Kementerian Keuangan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra PD, namun tidak ada implikasi terhadap kebutuhan pelayanan BPKAD Kab. Lamongan.

Adapun telaah terhadap Renstra PD Provinsi dilakukan terhadap Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024. Telaahan dilakukan dengan menyandingkan sasaran jangka menengah BPKAD Provinsi Jawa Timur dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Lamongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan BPKAD Kabupaten Lamongan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya faktor pendorong dan faktor penghambat tersebut menjadi bahan penyusunan isu strategis. Berikut disajikan matrik hasil telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024:

**TABEL III.3 TELAHAH RENSTRA BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR**

Renstra BPKAD JATIM	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
<p>3. Terwujudnya Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan</p> <p>Indikator :</p> <p>a. Prosentase anggaran belanja daerah yang efisien</p> <p>b. Prosentase partisipasi kab/kota di Jawa Timur dalam bidang pengelolaan keuangan</p>	<p>Perlunya Peningkatan Kualitas Optimalisasi dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p>	<p>1. Adanya peraturan perundang-undangan terkait sistem keuangan yang dapat dipedomani</p> <p>2. Komitmen dan etos kerja ASN BPKAD yang tinggi</p> <p>3. Sarana dan Prasarana yang memadai</p> <p>4. Secara bertahap akan dilakukan bimtek dan</p>	<p>1. Pengembangan teknologi belum maksimal terkait Sistem Keuangan serta inovasi-inovasi yang mendukung kemudahan pelayanan</p> <p>2. Kuantitas dan kualitas SDM BPKAD masih kurang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja</p>

Renstra BPKAD JATIM	Permasalahan PD	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
daerah 4. Meningkatnya Kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jatim  Indikator: a. Prosentase tupoksi bidang yang memiliki SOP terstandar  b. Keselarasan nilai aset daerah		pelatihan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota se Jawa Timur  Indikator : a. Prosentase keputusan gubernur tentang hasil evaluasi reperda APBD dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota			

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara tertib, efektif dan efisien. Selain untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan daerah/ nasional, RTRW diperlukan juga untuk merencanakan penggunaan sumber daya alam secara baik.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD juga tak kalah penting dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program karena apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.

Akan tetap dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hanya sebagai pendukung dan penunjang urusan keuangan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Telaahan terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang kemudian dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal menjadi dasar dalam merumuskan kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis, yaitu keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis yang harus diperhatikan berdasarkan tupoksi BPKAD adalah sebagai berikut :

**TABEL III.5 Lampiran Isu Startegis**

No	Permasalahan	Isu Stretegis
1.	Penyusunan Perencanaan APBD	Penyusunan Perencanaan APBD harus disusun secara realable untuk mencapai ekonomi pembangun.
		Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan anggaran dan penetapan kegiatan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila mengalami Refocusing (penganggaran yang dinamis)

<b>No</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Stretegis</b>
2.	Pengelolaan Aset Daerah	<p>Mengidentifikasi pemanfaatan aset daerah dalam pengelolaan aset agar dapat memaksimalkan utilitas penggunaan aset daerah untuk membantu pendapatan bagi daerah</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan aset daerah sesuai dengan perundangan yang berlaku</p>
3.	Pelaporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini atas laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian
4.	Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	<p>OPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun, Pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran</p> <p>Belum adanya sistem aplikasi pelaporan perpajakan yang terhubung antara Bendahara Pengeluaran OPD ke Kantor Pelayanan Pajak</p>

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Lamongan 2021 – 2026 diatas adalah sejalan dengan MISI Kelima “Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”, maka pengelolaan keuangan dan aset ke depan harus menjadi pendukung utama pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Pemerintahan Daerah” Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan Tujuan dan sasaran :

Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi, tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Sasaran :

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategi organisasi. Sasaran tersebut harus berisi pernyataan apa yang ingin dicapai organisasi dalam kurun waktu tertentu.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi V RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD), dapat dengan mudah dipahami melalui desain Cascading yang disajikan sebagai berikut :



Gambar IV.1 Cascading Misi V Pada RPJMD Tahun 2021-2026

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah memperhatikan dan mengacu pada cascading Misi 5 RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal” dengan indikator Opini BPK. Sehingga tujuan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah **“Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah”**.

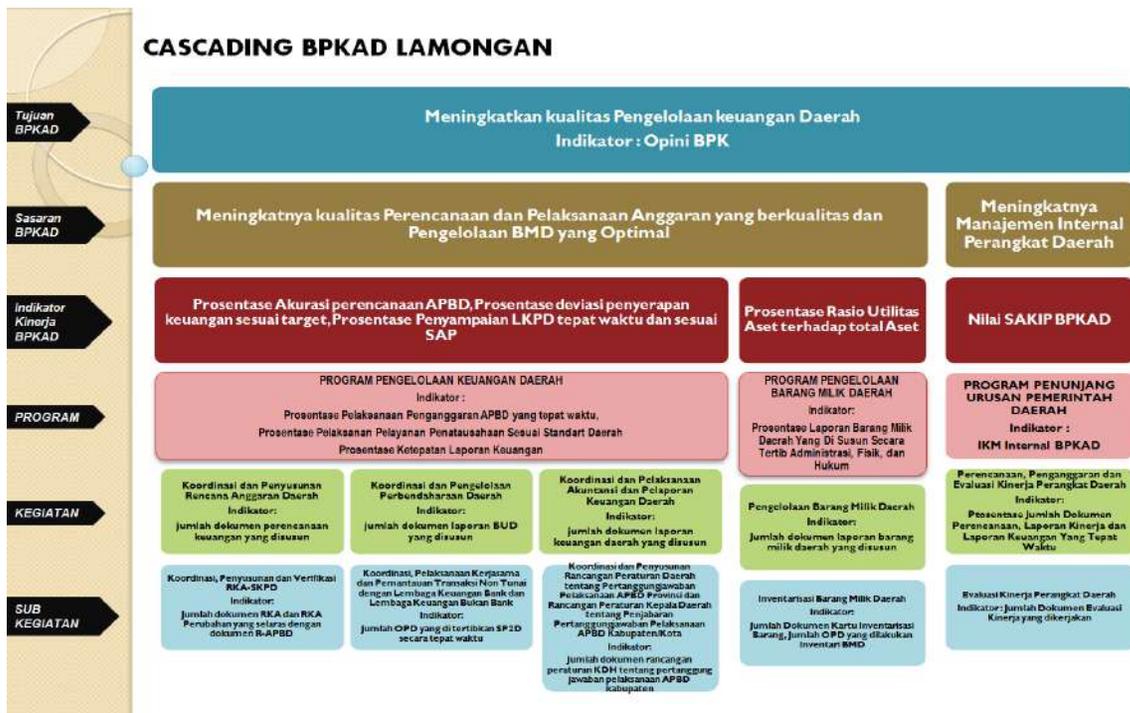
Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah sebagai berikut: **“Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal”**

Selanjutnya, untuk pemahaman mengenai hubungan dan kerangka kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dapat dengan mudah dipahami melalui desain cascading yang disajikan sebagai berikut:



Gambar IV.2 Cascading Renstra BPKAD Tahun 2021-2026

Adapun Keselarasan Sasaran dan Indikator Sasaran, Program dan Indikator Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan dan capaian kinerja pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar IV.3 Keselarasan Sasaran Program Dan Kegiatan Pada Renstra BPKAD Tahun 2021-2026.

Keterkaitan atau linieritas tujuan dan sasaran jangka menengah disertai dengan indikator kinerja dan target kinerja selama 5 tahun pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut;

**TABEL IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	-	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	96%	97%	98%	99%
			Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%
			Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	100%	100%	100%	100%
			Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%	89%	91%	92%	93%
	2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89,81%	89,82%	89,83%	89,84%	89,85%	

**TABEL IV.2 PENYELARASAN TUJUAN DAN SASARAN, DEFINISI OPERASIONAL, FORMULASI, SUMBER DATA, DAN PENETAPAN TARGET**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Kinerja Tujuan</b>	<b>Definisi Oprasional</b>	<b>Formulasi</b>	<b>Kondisi Awal</b>	<b>Kondisi Akhir</b>
Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	Pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan Hasil pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Penilaian dari BPK	WTP	WTP

Sasaran	Indikator	Formulasi	Definisi Oprasional	Kondisi Awal	Target Kinerja					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	$\frac{\Sigma \text{Kegiatan Perencanaan}}{\Sigma \text{Kegiatan Penganggaran}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah	N/A	95%	96%	97%	98%	99%	99%
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	$100\% - \frac{\Sigma \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\Sigma \text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung Penyerapan Realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah	N/A	10%	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%	9,8%
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	$\frac{\Sigma \text{Aset yang bisa dipergunakan}}{\Sigma \text{Aset Daerah}} \times 100\%$	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki	N/A	87%	89%	91%	92%	93%	93%
2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	Penilaian dari Inspektorat	Akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	N/A	89,81%	89,8%	89,83%	89,84%	89,85%	89,85%

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya.

Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, BPKAD Kabupaten Lamongan merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

a. Strategi :

Tujuan, sasaran dan strategi adalah tahap akhir dari perencanaan. Strategis yang merupakan komitmen organisasi dari pimpinan puncak sampai line terbawah. Strategi diperlukan untuk mencapainya suatu sasaran. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif yang mewujudkan visi dan misi. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran.

b. Arah Kebijakan :

Setelah strategi ditetapkan untuk mencapai tujuan dan memperlancar capaian sasaran tersebut pemerintah akan menetapkan kebijakan. Berkaitan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang telah disusun. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5

(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan

Oleh karena itu dalam mencapai pembangunan lima tahun ke depan, terdapat strategi-strategi dan arah kebijakan dari setiap sasaran yang disampaikan sebagai berikut :

**TABEL V.1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

<b>VISI</b>			<b>RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun n 2021-2026</b>
Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan			
<b>MISI 5</b>			
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi			
<b>TUJUAN</b>			
Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa			
<b>SASARAN</b>			
Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Penganggaran, Pelayanan Perbendaharaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset, Pelaporan keuangan Daerah Serta Pemantauan dan Pembinaan Teknis Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Secara Terpadu	Kesesuaian serta efektivitas Kegiatan Pada Saat Penganggaran dan Perencanaan APBD
			Pengelolaan KAS sesuai dengan Penerimaan Dana Daerah
			Ketepatan Waktu dan Opini BPK di Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban APBD
			Peningkatan Utilitas Penggunaan Aset Daerah serta Pengelolaan Penatausahaan Aset

Berdasarkan dengan arah kebijakan yang telah di tetapkan, maka perlu untuk mengidentifikasi keselarasan terhadap arah kebijakan RPJMD dan menyesuaikan horison waktu pelaksanaan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

**TABEL V.2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Tabel Linearitas arah kebijakan RPJMD dengan Renstra-PD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Time Horizon Arah Kebijakan RPJMD yang Terkait Renstra PD					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Peningkatan Efektivitas Belanja Daerah	Kesesuaian serta efektivitas Kegiatan Pada Saat Penganggaran dan Perencanaan APBD	√	√	√	√	√	√
		Pengelolaan KAS sesuai dengan penerimaan dana daerah	√	√	√	√	√	√
2.	Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah	Peningkatan Utilitas Penggunaan Aset Daerah serta Pengelolaan Penatausahaan Aset	√	√	√	√	√	√
3.	Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Ketepatan Waktu dan Opini BPK di Dalam Pelaporan Pertanggungjawaban APBD	√	√	√	√	√	√

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 RENCANA PROGRAM**

Penyusunan rencana program bermula dari pemikiran strategis tentang pencapaian tujuan dan sasaran dari suatu organisasi dengan menggunakan strategi yang telah diatur dalam suatu kebijakan. Untuk itu harus dipahami terlebih dahulu nilai-nilai strategis yang melekat pada organisasi tersebut dalam kaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. merujuk pada dokumen RPJMD, maka Misi yang dapat didukung secara langsung yakni Misi 5 “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Dinamis, Serta Memberikan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”. maka program yang telah ditetapkan untuk Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 hanya ada 3 (tiga) program antara lain adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan disajikan dalam tabel berikut :

**TABEL VII.1**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BPKAD KABUPATEN LAMONGAN**

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB</b>													
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>													
<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>													
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>IKM Internal BPKAD</b>	<b>Jumlah</b>		<b>85,0%</b>	<b>Rp 18.018.746.164</b>	<b>85,0%</b>	<b>Rp 17.336.196.059</b>	<b>85,0%</b>	<b>Rp 17.546.310.756</b>	<b>85,0%</b>	<b>Rp 17.765.113.251</b>	<b>85,0%</b>	<b>Rp 17.993.039.654</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu</b>	<b>%</b>		<b>100%</b>	<b>Rp 142.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 30.297.744</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 30.750.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 31.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 31.500.000</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	Jumlah		2 Dokumen, 4 Dokumen	Rp 47.500.000	2 Dokumen, 4 Dokumen	Rp 10.099.248	2 Dokumen, 4 Dokumen	Rp 10.250.000	2 Dokumen, 4 Dokumen	Rp 10.500.000	2 Dokumen, 4 Dokumen	Rp 10.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah		3 laporan	Rp 47.500.000	3 laporan	Rp 10.099.248	3 laporan	Rp 10.250.000	3 laporan	Rp 10.500.000	3 laporan	Rp 10.500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	Jumlah		5 dokumen	Rp 47.500.000	5 dokumen	Rp 10.099.248	5 dokumen	Rp 10.250.000	5 dokumen	Rp 10.500.000	5 dokumen	Rp 10.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	Jumlah		4 Dokumen	Rp 12.546.088.564	4 Dokumen	Rp 12.619.940.137	4 Dokumen	Rp 12.809.237.028	4 Dokumen	Rp 13.001.664.334	4 Dokumen	Rp 13.281.500.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang disusun	Jumlah		35 ASN	Rp 12.403.588.564	35 ASN	Rp 12.589.642.392	35 ASN	Rp 12.778.487.028	35 ASN	Rp 12.970.164.334	35 ASN	Rp 13.250.000.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan	Jumlah		32 kali	Rp 47.500.000	32 kali	Rp 10.099.248	32 kali	Rp 10.250.000	32 kali	Rp 10.500.000	32 kali	Rp 10.500.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun ( Neraca, LRA, CALK, SPJ Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPR)	Jumlah		7 laporan	Rp 47.500.000	7 laporan	Rp 10.099.248	7 laporan	Rp 10.250.000	7 laporan	Rp 10.500.000	7 laporan	Rp 10.500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan	Jumlah		12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Rp 47.500.000	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Rp 10.099.248	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Rp 10.250.000	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Rp 10.500.000	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Rp 10.500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%		100%	Rp 97.500.000	100%	Rp 60.849.248	100%	Rp 60.000.000	100%	Rp 65.000.000	100%	Rp 65.000.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah		75 orang	Rp 97.500.000	75 orang	Rp 60.849.248	75 orang	Rp 60.000.000	75 orang	Rp 65.000.000	75 orang	Rp 65.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	%		100%	Rp 600.000.000	100%	Rp 265.980.733	100%	Rp 267.100.000	100%	Rp 271.247.500	100%	Rp 272.412.213
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah		27 Jenis alat listrik	Rp 100.000.000	27 Jenis alat listrik	Rp 25.273.496	27 Jenis alat listrik	Rp 25.500.000	27 Jenis alat listrik	Rp 25.800.000	27 Jenis alat listrik	Rp 25.800.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan	Jumlah		62 jenis	Rp 100.000.000	62 jenis	Rp 25.273.496	62 jenis	Rp 25.500.000	62 jenis	Rp 25.800.000	62 jenis	Rp 25.800.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	Jumlah		73 jenis ATK	Rp 100.000.000	73 jenis ATK	Rp 63.386.748	73 jenis ATK	Rp 63.500.000	73 jenis ATK	Rp 64.500.000	73 jenis ATK	Rp 64.500.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah		10 Jenis Cetak an dan 17 Pengg andaa n	Rp 100.000.000	10 Jenis Cetak an dan 17 Pengg andaa n	Rp 63.386.748	10 Jenis Cetak an dan 17 Pengg andaa n	Rp 63.500.000	10 Jenis Cetak an dan 17 Pengg andaa n	Rp 64.500.000	10 Jenis Cetak an dan 17 Pengg andaa n	Rp 64.500.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah		12 jenis buku	Rp 50.000.000	12 jenis buku	Rp 12.636.748	12 jenis buku	Rp 12.600.000	12 jenis buku	Rp 13.000.000	12 jenis buku	Rp 13.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	Jumlah		75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	Rp 150.000.000	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	Rp 76.023.496	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	Rp 76.500.000	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	Rp 77.647.500	75Orang, 685 dus makanan, 805 snack, 206 dus air	Rp 78.812.213

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	%		100%	Rp 1.896.000.000	100%	Rp 1.810.100.244	100%	Rp 1.806.223.728	100%	Rp 1.803.925.354	100%	Rp 1.711.974.738
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pengadaan mobil jabatan	Jumlah		2 Unit Roda 4	Rp -	2 Unit Roda 4		2 Unit Roda 4	Rp -	2 Unit Roda 4	Rp -	2 Unit Roda 4	Rp -
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah		4 Unit Roda 4, 1 Minibus	Rp 1.800.000.000	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	Rp 1.750.773.496	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	Rp 1.746.223.728	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	Rp 1.743.425.354	4 Unit Roda 4, 1 Minibus	Rp 1.650.567.238
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	Jumlah		7 rak arsiip	Rp -	7 rak arsiip		7 rak arsiip	Rp -	7 rak arsiip	Rp -	7 rak arsiip	Rp -
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan	Jumlah		1 layar lcd, 1 lcd, 2 printe	Rp 96.000.000	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2	Rp 59.326.748	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2	Rp 60.000.000	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2	Rp 60.500.000	1 layar lcd, 1 lcd, 2 printer dan 1 Scanner, 2	Rp 61.407.500

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATU AN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	n gedung kantor			r dan 1 Scanner, 2 komputer		komputer		komputer		komputer		komputer	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	%		<b>100%</b>	<b>Rp 2.133.409.600</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.089.184.240</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.110.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.120.276.063</b>	<b>100%</b>	<b>Rp 2.152.080.204</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	Jumlah		5 Jenis Tagihan	Rp 1.074.157.600	5 Jenis Tagihan	<b>Rp 1.052.156.712</b>	5 Jenis Tagihan	<b>Rp 1.060.000.000</b>	5 Jenis Tagihan	<b>Rp 1.056.850.709</b>	5 Jenis Tagihan	Rp 1.072.703.469
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan /sopir yang menerima gaji/honor	Jumlah		38 orang	Rp 1.059.252.000	38 orang	<b>Rp 1.037.027.528</b>	38 orang	<b>Rp 1.050.000.000</b>	38 orang	<b>Rp 1.063.425.354</b>	38 orang	Rp 1.079.376.735

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	%		100%	Rp 603.248.000	100%	Rp 459.843.712	100%	Rp 463.000.000	100%	Rp 471.500.000	100%	Rp 478.572.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	Jumlah		1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Rp 70.000.000	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Rp 32.936.748	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Rp 33.000.000	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Rp 33.500.000	1 unit, 8 kendaraan roda 4 dan 19 kendaraan roda 2	Rp 34.002.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	Jumlah		19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	Rp 175.516.000	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	Rp 140.035.488	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	Rp 142.000.000	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	Rp 144.000.000	19 kendaraan roda 2 dan 8 kendaraan roda 4	Rp 146.160.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah		118 unit mebeleur	Rp 25.000.000	118 unit mebeleur	<b>Rp 25.375.000</b>	118 unit mebeleur	<b>Rp 25.000.000</b>	118 unit mebeleur	<b>Rp 25.500.000</b>	118 unit mebeleur	Rp 25.882.500
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah		30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	Rp 75.000.000	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	<b>Rp 38.011.748</b>	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	<b>Rp 38.000.000</b>	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	<b>Rp 38.500.000</b>	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	Rp 39.077.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah		1 paket taman, 1 unit gedung	Rp 257.732.000	1 paket taman, 1 unit gedung	<b>Rp 223.484.728</b>	1 paket taman, 1 unit gedung	<b>Rp 225.000.000</b>	1 paket taman, 1 unit gedung	<b>Rp 230.000.000</b>	1 paket taman, 1 unit gedung	Rp 233.450.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	. Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu, . Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah, . Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	%		100%	Rp 548.882.672.500	100%	Rp 528.090.996.866	100%	Rp 534.491.459.748	100%	Rp 541.156.568.251	100%	Rp 548.099.607.021
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	Jumlah		4 Dokumen	Rp 1.299.642.500	4 Dokumen	Rp 1.319.137.138	4 Dokumen	Rp 1.338.924.195	4 Dokumen	Rp 1.359.008.057	4 Dokumen	Rp 1.379.393.178

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni TA 2022	Jumlah		1 Dokumen	Rp 211.210.625	1 Dokumen	<b>Rp 214.378.784</b>	1 Dokumen	<b>Rp 217.594.466</b>	1 Dokumen	<b>Rp 220.858.383</b>	1 Dokumen	<b>224.171.259</b>
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD TA 2022	Jumlah		1 Dokumen	Rp 241.210.625	1 Dokumen	<b>Rp 244.828.784</b>	1 Dokumen	<b>Rp 248.501.216</b>	1 Dokumen	<b>Rp 252.228.734</b>	1 Dokumen	<b>256.012.165</b>
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	Jumlah		1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	<b>Rp 91.350.000</b>	1 Dokumen	<b>Rp 92.720.250</b>	1 Dokumen	<b>Rp 94.111.054</b>	1 Dokumen	<b>95.522.720</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	Jumlah		1 Dokumen	Rp 90.000.000	1 Dokumen	<b>Rp 91.350.000</b>	1 Dokumen	<b>Rp 92.720.250</b>	1 Dokumen		<b>Rp 94.111.054</b>	1 Dokumen	<b>95.522.720</b>
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disusun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	Jumlah		1 Dokumen	Rp 242.410.625	1 Dokumen	<b>Rp 246.046.784</b>	1 Dokumen	<b>Rp 249.737.486</b>	1 Dokumen		<b>Rp 253.483.548</b>	1 Dokumen	<b>257.285.802</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang disusun	Jumlah		1 Dokumen	Rp 237.568.125	1 Dokumen	<b>Rp 241.131.647</b>	1 Dokumen	<b>Rp 244.748.622</b>	1 Dokumen	<b>Rp 248.419.851</b>	1 Dokumen	<b>252.146.149</b>
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD 2023	Jumlah		1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	<b>Rp 76.125.000</b>	1 Dokumen	<b>Rp 77.266.875</b>	1 Dokumen	<b>Rp 78.425.878</b>	1 Dokumen	<b>79.602.266</b>
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	Jumlah		2 kali	Rp 112.242.500	2 kali	<b>Rp 113.926.138</b>	2 kali	<b>Rp 115.635.030</b>	2 kali	<b>Rp 117.369.555</b>	2 kali	<b>119.130.098</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	Jumlah		4 Laporan	<b>Rp 900.000.000</b>	4 Laporan	<b>Rp 913.500.000</b>	4 Laporan	<b>Rp 927.202.500</b>	4 Laporan	<b>Rp 941.110.538</b>	4 Laporan	<b>Rp 955.227.196</b>
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	Jumlah		288 laporan	Rp 125.000.000	288 laporan	<b>Rp 126.875.000</b>	288 laporan	<b>Rp 128.778.125</b>	288 laporan	Rp 130.709.797	288 laporan	132.670.444

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	Jumlah		260 dokumen	Rp 125.000.000	260 dokumen	Rp 126.875.000	260 dokumen	Rp 128.778.125	260 dokumen	Rp 130.709.797	260 dokumen	132.670.444
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	Jumlah		1 Dokumen	Rp 25.000.000	1 Dokumen	Rp 25.375.000	1 Dokumen	Rp 25.755.625	1 Dokumen	Rp 26.141.959	1 Dokumen	26.534.089
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	Jumlah laporan dana transfer	Jumlah		14 laporan	Rp 125.000.000	14 laporan	Rp 126.875.000	14 laporan	Rp 128.778.125	14 laporan	Rp 130.709.797	14 laporan	132.670.444

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATU AN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya													
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	Jumlah		65 OPD	Rp 50.000.000	65 OPD	Rp 50.750.000	65 OPD	Rp 51.511.250	65 OPD	Rp 52.283.919	65 OPD	53.068.178

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah										
				2022		2023		2024		2025		2026		
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	Jumlah		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.750.000	1 Dokumen	Rp 51.511.250	1 Dokumen		1 Dokumen		
											Rp 52.283.919		53.068.178	
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen		1 Dokumen		
											Rp -		-	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas												
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Potongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan potongan atas SP2D	Jumlah		65 OPD	Rp 85.000.000	65 OPD	<b>Rp 86.275.000</b>	65 OPD	<b>Rp 87.569.125</b>	65 OPD	Rp 88.882.662	65 OPD	90.215.902

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	Jumlah		100 buku	Rp 110.000.000	100 buku	Rp 111.650.000	100 buku	Rp 113.324.750	100 buku	Rp 115.024.621	100 buku	116.749.991
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	Jumlah		65 OPD	Rp 205.000.000	65 OPD	Rp 208.075.000	65 OPD	Rp 211.196.125	65 OPD	Rp 214.364.067	65 OPD	217.579.528
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	Jumlah		4 Dokumen	Rp 1.100.000.000	4 Dokumen	Rp 1.116.500.000	4 Dokumen	Rp 1.133.247.500	4 Dokumen	Rp 1.150.246.213	4 Dokumen	Rp 1.167.499.906

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	Jumlah		12 Dokumen	Rp 25.000.000	12 Dokumen	Rp 25.375.000	12 Dokumen	Rp 25.755.625	12 Dokumen	Rp 26.141.959	12 Dokumen	Rp 26.534.089
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	Jumlah		65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 160.000.000	65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 162.400.000	65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 164.836.000	65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 167.308.540	65 Dokumen, 130 dokumen	Rp 169.818.168
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	Jumlah		12 Dokumen	Rp 141.000.000	12 Dokumen	Rp 143.115.000	12 Dokumen	Rp 145.261.725	12 Dokumen	Rp 147.440.651	12 Dokumen	Rp 149.652.261
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasia	Jumlah		2 Dokumen	Rp 199.000.000	2 Dokumen	Rp 201.985.000	2 Dokumen	Rp 205.014.775	2 Dokumen	Rp 208.089.997	2 Dokumen	Rp 211.211.347

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Keuangan Pemerintah Daerah	n												
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten	Jumlah		1 Dokumen	Rp 320.000.000	1 Dokumen	<b>Rp 324.800.000</b>	1 Dokumen	<b>Rp 329.672.000</b>	1 Dokumen	<b>Rp 334.617.080</b>	1 Dokumen	<b>Rp 339.636.336</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah		100 persen	Rp 29.000.000	100 persen	Rp 29.435.000	100 persen	Rp 29.876.525	100 persen	Rp 30.324.673	100 persen	Rp 30.779.543
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang disusun	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban	Jumlah		65 Dokumen	Rp 184.000.000	65 Dokumen	Rp 186.760.000	65 Dokumen	Rp 189.561.400	65 Dokumen	Rp 192.404.821	65 Dokumen	Rp 195.290.893
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggungjawaban	Jumlah		65 Dokumen	Rp 42.000.000	65 Dokumen	Rp 42.630.000	65 Dokumen	Rp 43.269.450	65 Dokumen	Rp 43.918.492	65 Dokumen	Rp 44.577.269
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	Jumlah		462 Desa	Rp 545.452.672.500	462 Desa	Rp 524.609.546.866	462 Desa	Rp 530.957.787.998	462 Desa	Rp 537.569.891.425	462 Desa	Rp 544.459.130.042

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah					Rp 14.000.000.000		Rp 14.210.000.000		Rp 14.423.150.000		Rp 14.639.497.250		Rp 14.859.089.709
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	Jumlah		2 kali	Rp 531.452.672.500	2 kali	Rp 510.399.546.866	2 kali	Rp 516.534.637.998	2 kali	Rp 522.930.394.175	2 kali	Rp 529.600.040.334
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak	Jumlah		1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -	1 Dokumen	Rp -
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	Jumlah		4 Dokumen	Rp 130.357.500	4 Dokumen	Rp 132.312.863	4 Dokumen	Rp 134.297.555	4 Dokumen	Rp 136.312.019	4 Dokumen	Rp 138.356.699

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah		1 Dokumen	Rp 53.012.000	1 Dokumen	Rp 53.807.180	1 Dokumen	Rp 54.614.288	1 Dokumen	Rp 55.433.502	1 Dokumen	Rp 56.265.005
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	Jumlah		2 kali	Rp 77.345.500	2 kali	Rp 78.505.683	2 kali	Rp 79.683.268	2 kali	Rp 80.878.517	2 kali	Rp 82.091.695
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Prosentase laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum.</b>	%		100%	Rp 900.000.000	100%	Rp 865.908.000	100%	Rp 876.402.805	100%	Rp 887.331.548	100%	Rp 898.716.012

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	Jumlah		4 Dokumen	Rp 900.000.000	4 Dokumen	Rp 865.908.000	4 Dokumen	Rp 876.402.805	4 Dokumen	Rp 887.331.548	4 Dokumen	Rp 898.716.012
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	Jumlah		1 Dokumen	Rp 75.000.000	1 Dokumen	Rp 70.000.000	1 Dokumen	Rp 71.402.805	1 Dokumen	Rp 72.000.000	1 Dokumen	Rp 73.000.000
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	Jumlah		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.400.000	1 Dokumen	Rp 51.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPBMMD	Jumlah		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.400.000	1 Dokumen	Rp 51.000.000
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	Jumlah		1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.000.000	1 Dokumen	Rp 50.400.000	1 Dokumen	Rp 51.000.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	Jumlah		10 buku dan 65 OPD	Rp 70.000.000	10 buku dan 65 OPD	Rp 70.000.000	10 buku dan 65 OPD	Rp 70.000.000	10 buku dan 65 OPD	Rp 71.000.000	10 buku dan 65 OPD	Rp 72.000.000
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang	Jumlah		15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	Rp 75.000.000	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	Rp 70.000.000	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	Rp 70.000.000	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	Rp 71.000.000	15 buku, 15 Buku, 13000 Buah dan 65 OPD	Rp 72.000.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
	dilakukan inventarisasi BMD												
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	Jumlah		12 buah, 30 bidang	Rp 140.000.000	12 buah, 30 bidang	<b>Rp 135.000.000</b>	12 buah, 30 bidang	<b>Rp 135.000.000</b>	12 buah, 30 bidang	<b>Rp 137.000.000</b>	12 buah, 30 bidang	<b>Rp 138.000.000</b>
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan penggunaan bangunan	Jumlah		3 Dokumen	Rp 75.000.000	3 Dokumen	<b>Rp 70.000.000</b>	3 Dokumen	<b>Rp 70.000.000</b>	3 Dokumen	<b>Rp 71.050.000</b>	3 Dokumen	<b>Rp 72.000.000</b>

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATUAN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	Jumlah		65 OPD	Rp 50.000.000	65 OPD	Rp 50.000.000	65 OPD	Rp 50.000.000	65 OPD	Rp 50.500.000	65 OPD	Rp 51.000.000
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	Jumlah		65 OPD	Rp 75.000.000	65 OPD	Rp 70.000.000	65 OPD	Rp 70.000.000	65 OPD	Rp 71.000.000	65 OPD	Rp 72.000.000
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	Jumlah		2 Dokumen	Rp 70.000.000	2 Dokumen	Rp 70.000.000	2 Dokumen	Rp 70.000.000	2 Dokumen	Rp 71.000.000	2 Dokumen	Rp 72.000.000

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	SATU AN	Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah									
				2022		2023		2024		2025		2026	
				Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Target Kinerja	Target Anggaran (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	11	12	11	12
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	Jumlah		65 OPD	Rp 120.000.000	65 OPD	Rp 110.908.000	65 OPD	Rp 120.000.000	65 OPD	Rp 121.581.548	65 OPD	Rp 123.716.012
				<b>Total</b>	<b>Rp 567.801.418.664</b>		<b>Rp 576.318.439.944</b>		<b>Rp 584.963.216.543</b>		<b>Rp 593.737.664.791</b>		<b>Rp 602.643.729.763</b>

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2021-2026 Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lamongan dengan Dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lamongan yang tercantum dalam target kinerja RPJMD. Indikator kinerja BPKAD Kabupaten Lamongan yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

**TABEL VII.1 INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>Tujuan : Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah</b>								
1.	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
<b>Sasaran : Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal</b>								
1.	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	N/A	95%	96%	97%	98%	99%	99%
2.	Prosentase Deviasi Penyerapan Keuangan Sesuai Target	N/A	10%	9,85%	9,85%	9,8%	9,8%	9,8%
3.	Prosentase penyampaian LKPD tepat waktu sesuai SAP	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total aset	N/A	75%	80%	85%	90%	95%	95%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 disusun guna sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaannya ditetapkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

3. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Lamongan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra BPKAD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.
4. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan BPKAD berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
5. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada BPKAD Kabupaten Lamongan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan dan Renstra BPKAD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut. Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2021-2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, 83 sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA Kabupaten Lamongan, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Lamongan.

## LAMPIRAN MATRIKS BPKAD

TUJUAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Meningkatkan kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	Pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan Hasil pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan	Penilaian dari BPK
SASARAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas dan Pengelolaan BMD yang Optimal	Prosentase Akurasi penganggaran APBD	95%	Pengukuran untuk menghitung Ketepatan antara perencanaan anggaran dengan realisasi belanja daerah	$\frac{\sum \text{Kegiatan Perencanaan}}{\sum \text{Kegiatan Penganggaran}} \times 100\%$
	Prosentase deviasi penyerapan keuangan sesuai target	10%	Pengukuran untuk menghitung Penyerapan Realisasi belanja dengan anggaran belanja daerah	$100\% - \frac{\sum \text{Realisasi Belanja Daerah}}{\sum \text{Total Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$
	Prosentase Penyampaian LKPD tepat waktu dan sesuai SAP	100%	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu	Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD ≤ Batas Waktu Penetapan Pertanggungjawaban APBD
	Prosentase Rasio Utilitas Aset terhadap total Aset	87%	Pengukuran untuk menghitung jumlah aset yang dipergunakan dengan total aset yang dimiliki	$\frac{\sum \text{Aset yang bisa dipergunakan}}{\sum \text{Aset Daerah}} \times 100\%$
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip BPKAD	89,81%	Akumulasi penilaian dari komponen manajemen kinerja yang dievaluasi yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Kinerja.	Penilaian dari Inspektorat
PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Internal BPKAD	85,0%	suatu gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Nilai IKM dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Presentase Pelaksanaan Penganggaran APBD tepat waktu	100%	Ukuran Capaian kinerja penyusunan Penganggaran APBD yang di susun sesuai dengan waktu yang telah di tetapkan	Jumlah dokumen anggaran yang disusun tepat waktu/ dokumen anggaran yang dihasilkan
	Prosentase ketepatan laporan keuangan OPD	100%	Ukuran capaian kinerja dalam penyampaian pelaksanaan APBD secara tepat waktu, Ketidaktepatan Dalam Penyusunan APBD Akan Dikenai Sanksi	Jumlah laporan keuangan yang tepat waktu / jumlah laporan keuangan yang dihasilkan
	Prosentase pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai standart daerah	100%	Gambaran terkait pelaksanaan pelayanan penatausahaan sesuai SOP Pelayan penatausahaan	Jumlah pelayanan penatausahaan sesuai standard daerah/ jml pelayanan penatausahaan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase Laporan Barang Milik Daerah Yang Di Susun Secara Tertib Administrasi, Fisik, dan Hukum	100%	Gambaran terkait pelaksanaan dokumen dalam pelaporan barang milik daerah yang di susun secara tertib administrasi dan hukum	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang disusun secara tertib administrasi, Fisik dan Hukum. / jumlah dokumen barang milik daerah
KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu	100%	Ukuran capaian kinerja dalam perencanaan dan penyusunan program serta laporan kinerja dan evaluasi yang tepat waktu	Durasi Waktu Pengerjaan perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi ≤ Batas Waktu Penetapan perencanaan, laporan kinerja dan evaluasi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase tingkat penyelesaian tugas setelah mengikuti peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	100%	Ukuran Peningkatan Kualitas ASN menjadi lebih baik dan bermutu melalui pelatihan	Jumlah Pegawai BPKAD yang mengikuti Pelatihan/ Jumlah Pegawai BPKAD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Ukuran capaian Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Penilaian internal BPKAD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang aparatur	Penilaian internal BPKAD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	Ukuran capaian Unit kerja internal yang terlayani dengan baik	Penilaian internal BPKAD
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	100%	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang aparatur dengan kondisi baik	Penilaian internal BPKAD
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah dokumen perencanaan keuangan yang disusun	4 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan kegiatan penganggaran keuangan yang di susun	-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen laporan BUD yang disusun	4 Laporan	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan Bendahara Umum Daerah yang di susun	-
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan daerah yang disusun	4 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan keuangan Daerah yang di susun	-
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Desa yang mendapatkan bantuan keuangan	462 Desa	Terlaksananya kegiatan bantuan keuangan di beberapa desa	-
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah analisis dan implementasi sistem informasi keuangan daerah	4 Dokumen	Suatu gambaran terkait analisis serta implementasi terhadap sistem informasi keuangan daerah	-
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah yang di susun	4 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan barang milik Daerah yang di susun	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan tepat waktu	4 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan administrasi keuangan yang disusun tepat waktu	-
<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>DEFINISI OPRASIONAL</b>	<b>FORMULA</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan, jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	2 Dokumen, 4 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan kegiatan perencanaan yang diselesaikan dan jumlah dokumen renstra dan renja yang di selesaikan	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 laporan	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang di susun	-
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dikerjakan	5 dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan evaluasi kinerja yang dikerjakan	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	35 ASN	Suatu dokumen yang terkait dengan penyediaan gaji dan tunjangan ASN yang di susun	-
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online pengajuan belanja 2 kali perbulan	32 Kali	Suatu dokumen yang terkait dengan pelaksanaan verifikasi : TERPA, Realisasi Fisik, SPP, SPM, SPJ Fungsional (Bendahara pengeluaran PPKD dan SPKD), SPJ Fungsional (Bendahara Penerimaan SKPD dan PPKD), PBB online yang dikerjakan	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ, Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPRRA)	7 laporan	Suatu dokumen yang terkait dengan Laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca, LRA, CALK, SPJ, Fungsional, PBB, Realisasi Fisik, TEPRRA) yang dikerjakan	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan	12 laporan, 2 laporan, 4 laporan	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan keuangan bulanan/semesteran/triwulanan yang disusun	-

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	75 Orang	Suatu dokumen yang terkait dengan evaluasi kinerja yang dikerjakan	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	27 Jenis alat listrik	Terpenuhinya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang di butuhkan	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang dibutuhkan	5 orang	Terpenuhinya Alat Kebersihan yang dibutuhkan	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	64 jenis ATK	Terpenuhinya alat tulis kantor yang dibutuhkan	-
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan pengandaan	10 Jenis Cetakan dan 17 Pengandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan pengandaan yang di butuhkan	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10 jenis buku	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, Jumlah pengadaan makan dan minum	69 Orang, 80 dus air, 1500 jenis makanan, 1500 snack	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi serta kelengkapan yang dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan	-
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan mobil jabatan	3 unit	Terpenuhinya pengadaan mobil jabatan yang di butuhkan	-
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional	1 unit roda 4	Terpenuhinya pengadaan kendaraan dinas dinas/operasional yang di butuhkan	-
Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan Mebeleur	7 rak arsiip	Terpenuhinya pengadaan Mebeleur yang di butuhkan	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 layar lcd, 1 lcd, 7 printer, 7 komputer	Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang di butuhkan	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 Jenis	Terpenuhinya pembayaran rekening atas Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honoerer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	38 orang	Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor terkait tenaga honorer, tenaga pengamanan, sopir yang menerima gaji/honor	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan, jumlah STNK yang terlunasi	1 unit, 9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2	Terlaksananya pemerliharahan mobil jabatan secara rutin dan berkala serta Pajak STNK yang terbayarkan	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional,	9 kendaraan roda 4 dan 26 kendaraan roda 2,	Terlaksananya pemerliharahan mobil kendaraan dinas / oprasional secara rutin dan berkala	-
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	30 unit mebeleur	Terlaksananya pemerliharahan mebeleur secara rutin dan berkala	-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	30 unit perlengkapan, 30 unit peralatan	Terlaksananya pemerliharahan peralatan kantor secara rutin dan berkala	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket taman, 1 unit gedung	Terlaksananya pemerliharahan gedung kantor secara rutin dan berkala	-
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan KUA dan PPAS APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya yang disusun	-

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan KUA PPA dan KUPA, PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya yang di susun	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan RKA dan RKA Perubahan yang selaras dengan dokumen R-APBD yang di susun	-
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan DPA dan DPPA yang selaras dengan dokumen APBD yang di susun	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang di susun dan jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang APBD yang disusun	-
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Raperda tentang perubahan APBD yang di susun	-
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Pedoman pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Pedoman pelaksanaan APBD yang di susun	-
Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	2 kali	Terlaksananya kegiatan pembinaan yang dilakukan	-
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan posisi kas daerah	288 laporan	Suatu laporan yang terkait dengan posisi kas daerah yang di susun	-
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah dokumen pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	-
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD	260 dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan SPD yang dikerjakan	-
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan pembiayaan daerah	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait penatausahaan pembiayaan daerah	-
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan dana transfer	14 laporan	Suatu laporan yang terkait dengan dana transfer yang di susun	-
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah OPD yang di tertibkan SP2D secara tepat waktu	65 OPD	Terpenuhinya OPD yang di terbitkan SP2D secara tepat waktu	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan PFK yang disusun	-
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah dokumen Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis yang di susun	-

Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D	65 OPD	Suatu laporan yang terkait dengan Rekonsiliasi data penerimaan, pengeluaran dan pemotongan atas SP2D yang di dikerjakan	-
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek	100 buku	Terpenuhinya buku Sisdur perbendaharaan, sosialisasi dan bimtek yang dilakukan	-
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan daerah.	65 OPD	Suatu gambaran terkait terlaksananya kegiatan pembinaan penatausahaan keuangan daerah yang dilakukan	-
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah dokumen LRA konsolidasi bulanan	12 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan LRA konsolidasi bulanan yang di laksanakan	-
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi	65 Dokumen, 130 dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan bukti memorial, jumlah dokumen hasil rekonsiliasi yang di lakukan	-
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	12 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disusun	-
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen laporan keuangan konsolidasian	2 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan keuangan konsolidasian yang disusun	-
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kabupaten yang disusun	-
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1 Dokumen	Terpenuhinya dokumen terkait tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	-
Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen laporan analisis keuangan daerah yang di susun	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan analisis keuangan daerah yang di susun	-
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan SOP	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan kebijakan dan SOP yang di susun	-
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan informasi keuangan daerah yang disusun	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan laporan informasi keuangan daerah yang disusun	-
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Suatu gambaran terkait Terlaksananya OPD dalam penyusunan dokumen pertanggung jawaban	-
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyusun dokumen pertanggung jawaban	65 Dokumen	Suatu gambaran terkait Terlaksananya OPD dalam penyusunan dokumen pertanggung jawaban	-

Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah tepat waktu	12 Laporan	Terpenuhinya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah tepat waktu	-
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah penyaluran bantuan	2 kali	Terpenuhinya kegiatan dalam penyaluran bantuan keuangan	-
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah pengelola dana darurat dan mendesak	1 paket	Terlaksananya kegiatan dalam Pengelolaan dana darurat dan mendesak	-
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan analisis Data Bidang Keuangan Daerah yang disusun	-
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	2 kali	Terlaksananya pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	-
Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen SSH	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan Dokumen SSH yang disusun	-
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen standar barang dan standar kebutuhan barang	1 Dokumen	Suatu dokumen yang terkait dengan standar barang dan standar kebutuhan barang yang disusun	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMBMD	masing-masing 150 buku	Suatu dokumen yang terkait dengan RKBMD dan RKPMBMD yang disusun	-
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan	250 buku	Suatu dokumen yang terkait dengan peraturan perundangan yang disusun	-
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang	180 buku dan 65 OPD	Suatu dokumen yang terkait dengan peraturan perundangan, jumlah peningkatan tertib penatausahaan BMD, sosialisasi penatausahaan barang yang disusun	-
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD	11 buku dan 65 OP	Suatu dokumen yang terkait dengan kartu inventaris barang audited, jumlah dokumen kartu inventarisasi barang unaudited, jumlah label barang, jumlah OPD yang dilakukan inventarisasi BMD	-
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Papan Nama Kepemilikan, Jumlah Sertifikat Tanah	1000 lembar, 6 buah, 20 bidang	Terlaksananya pengamanan barang milik daerah dengan papan nama kepemilikan dan sertifikat tanah	-
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penggunaan tanah dan pgunaan bangunan	12 SK	Suatu dokumen yang terkait dengan penggunaan tanah dan bangunan barang milik daerah	-
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	65 OPD	Terpenuhinya optimalisasi utilitas barang milik daerah yang akan dilakukan pemanfaatan (sewa, hibah, pinjam pakai)	-
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	150 buku dan 65 OPD	Terlaksananya OPD yang mengikuti pelaksanaan rekonsiliasi barang milik daerah	-
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah buku penyusunan laporan barang milik daerah	65 OPD	Suatu dokumen yang terkait dengan penyusunan buku laporan barang milik daerah	-
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM pengelola barang milik daerah yang mengikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	65 OPD	Terpenuhinya SDM yang mengikuti pembinaan mengenai pengelolaan barang milik daerah, sosialisasi pengelolaan BMD	-